



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN



2018
2023

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Seram No. 02 Citarum, Bandung Wetan,
Kota Bandung. Telp/Faks (022) 423 5180





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

JALAN SERAM NO. 2 KOTA BANDUNG 40115

TELEPON (022) 4231921

Laman : www.dispusip.bandung.go.id; Pos-el (E-mail): dispusip.kota.bdg@gmail.com

K E P U T U S A N

Plt. KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Nomor 2291 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGI DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2018-2023

Plt. KEPALA DINAS DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

- Menimbang : a. Bahwa Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. Bahwa Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perubahan Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJPN Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 06 tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Wali Kota, Peraturan Bersama, Keputusan Wali Kota, dan Instruksi Wali Kota;
21. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan DISARPUS Kota Bandung dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung Tahun 2018-2023 dijadikan bahan acuan dalam perencanaan kinerja Disarpus Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sesuai dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 7 Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN

Drs. ASEP SAEFUL GUFRON, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905191996031003



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

JALAN SERAM NO. 2 KOTA BANDUNG 40115

TELEPON (022) 4231921

Laman : www.dispusip.bandung.go.id; Pos-el (E-mail): dispusip.kota.bdg@gmail.com

K E P U T U S A N

Plt. KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NOMOR 2250 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGI DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN TAHUN 2018-2023

Plt. KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sangat diperlukan perencanaan yang matang yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung Tahun 2018-2023, yang ditetapkan oleh Keputusan Plt.Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Bandung Nomor 143 – Bappelitbang tanggal 29 November 2018 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 -2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk dan Menetapkan para pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Perubahan Renstra SKPD Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan tugasnya, Tim Penyusun Renstra harus melaksanakan secara tertib, terencana, terarah, terpadu dan terkoordinasi.
- KETIGA** : Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Plt. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung setelah selesai kegiatan

- KEEMPAT : Semua kebutuhan dalam pelaksanaan tugas ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disarpus Kota Bandung Tahun Anggaran 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sesuai dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 1 Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN

Drs. ASEP SAEFUL GUFRON, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196905191996031003

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2018-2023**

1.	Ketua	:	Plt. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Drs. ASEP SAEFUL GUFRON, M.Si
2.	Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan MEDI MAHENDRA,A.P.,S.Sos.,M.Si
3.	Anggota	:	
	I. Pokja Pendahuluan dan Penutup;	:	1. Elly Indraningsih, S,Sos., M.AP 2. Rina Rohma Renggani, S.Sos., MM
	II. Pokja Gambaran Pelayanan SKPD;	:	
	III. Pokja Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi;	:	1. Dina Nesfiana, SH 2. Dian Kurnia Adyani, SH 3. Sudartati,S.Sos, M.AP
	IV. Pokja Tujuan dan Sasaran;	:	
	V. Pokja Strategi dan Arah Kebijakan;	:	1. Dra. Sri Mardiani, M.AP 2. Titin Supriatin, S.Sos., M.Si 3. Drs. Prim Aquarinto
	VI. Pokja Rencana Program dan	:	1. Dra. Hj. Endrawati Padmadisastra, M.Si 2. Dina Nesfiana, SH 3. Juni Akbar, S.Sos

	Kegiatan Serta Pendanaan;		
VII.	Pokja Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Felly Lastiawati, M.AP 2. Moch. Riza Mahendra, SE., M.Si 3. Yani Juliani, S.IP

Plt. KEPALA DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN

Drs. ASEP SAEFUL GUFRON, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196905191996031003



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung(Dispusip) Kota Bandung tahun 2018 – 2023 disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif berwawasan lima tahun dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Arsip dan



Perpustakaan Kota Bandung mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan direncanakan, sehingga mencakup sejumlah langkah yang dirancang untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan, termasuk pertanggungjawaban dari suatu program dan kegiatan. Renstra juga merupakan komitmen Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung terhadap kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi sekarang ini, dimana serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dibuat oleh pimpinan SKPD sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, hal ini ditunjang oleh **Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung**. Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan, lembaga harus mampu untuk meningkatkan minat baca masyarakat melalui bahan bacaan atau *literature* yang terseleksi dan *up to date*. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Kearsipan, lembaga harus mampu mendorong SKPD untuk melaksanakan penyelenggaraan kearsipan secara baku serta



mengamankan arsip-arsip statis yang memiliki nilai sejarah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Untuk melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana tersebut di atas, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung menyusun beberapa program dan kegiatan yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target yang ditetapkan dengan memaksimalkan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia termasuk Pejabat Fungsional Pustakawan dan Pejabat Fungsional Arsiparis.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2018-2023 landasan hukum yang digunakan adalah:

- a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- d. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;



- g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
- h. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.
- i. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung no.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.
- j. Peraturan Walikota Bandung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung dimaksudkan sebagai pedoman resmi Disarpus Kota Bandung dalam menyusun program kegiatan yang sangat strategis Urusan Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bandung.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Renstra Perubahan Diarpus Kota Bandung tahun 2018 – 2023 disusun dengan Tujuan sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka mensinkronisasi serta mensinergikan perencanaan pembangunan daerah;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan



pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Bandung

3. Menjabarkan gambaran umum tentang program perpustakaan dan kearsipan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi misi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung Kota Bandung;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung Kota Bandung adalah:





KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi melalui Reviu Renstra Perangkat Daerah;

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, serta indikator dari tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN





Memuat pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Merumuskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB.VIII PENUTUP





BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, hal ini ditunjang oleh Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan, lembaga harus siap untuk mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau *literature* yang terseleksi dan *up to date*. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Kearsipan, lembaga harus siap menampung, menyimpan, memelihara serta mengamankan arsip-arsip statis yang memiliki nilai sejarah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, serta tidak kalah pentingnya DISARPUS sebagai lembaga yang harus memberikan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan penataan kearsipan di Kota Bandung.

Adapun dasar hukum terbentuknya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bandung adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung dengan nomenklatur Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Keputusan tersebut diambil sesuai dengan laju perkembangan zaman dan era otonomi daerah saat ini.

Kronologis perjalanan lembaga Perpustakaan dan Kearsipan dari pembentukan sampai dengan sekarang, terurai sebagai berikut :



- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1987, Lembaga Kearsipan bernama Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi, kedudukan di bawah Bagian Umum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07 Tahun 1990 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengesahan Susunan Organisasi UPTD Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang berlokasi di Jl. Jend. A. Yani Nomor 239, Sayap Kiri Kantor Dinas P & K Kota Bandung;
- c. Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16 Tahun 1994 dan No. 17 Tahun 1994, lembaga kearsipan yang semula bernama Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi statusnya ditingkatkan, menjadi Kantor Arsip Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- d. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Unit Pelaksana Daerah (UPD) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Surat Persetujuan Menteri Penertiban Aparatur Negara (MENPAN) No. 126/ MK.Waspan/ 3/1999 tanggal 19 Maret 1999 dan Surat Ijin Prinsip dari Menteri Dalam Negeri Nomor 061/475/SJ tanggal 6 Maret 1999, statusnya ditingkatkan, menjadi Unit Pelaksana Daerah (UPD)



Perpustakaan Umum yang langsung bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah, yang berlokasi di Jl. Singaperbangsa Bandung;

- e. Berdasarkan Keputusan Walikota Kodya Daerah Tingkat II Bandung No. 599 Tahun 1999, UPD diubah menjadi Kantor Perpustakaan Umum Kota Bandung.
- f. Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, Lembaga Perpustakaan Dan Kearsipan yaitu Kantor Arsip Daerah dan Kantor Perpustakaan Umum Kota Bandung, digabung menjadi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung;
- g. Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, kata Umum pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung dihilangkan menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung dan berlokasi di Jl. Wastukencana No.2 Bandung;
- h. Mulai tanggal 25 Mei 2009, Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Bandung, menempati gedung yang berlokasi di jalan Pelajar Pejuang '45 Nomor 8, Bandung;
- i. Pada bulan Mei 2012 sampai Desember 2016, Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Bandung menempati gedung baru yang berlokasi di Jl. Caringin Nomor 103, Bandung.
- j. Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi



Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, nama Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan di Pemerintah Kota Bandung yaitu menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung. Kata Umum pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung dihilangkan berlokasi di jalan Caringin No 103 Bandung.

- k. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, statusnya ditingkatkan nama lembaga Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah di Pemerintah Kota Bandung yaitu menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, saat ini berlokasi di jalan P. Seram Luwuk Banggao No.2 Bandung.
- l. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung no.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 tahun 2021 adalah **“Menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dibidang Kearsipan dan Perpustakaan”**

b. Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok diatas Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung mempunyai fungsi :





1. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan arsip daerah;
2. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pengelolaan arsip serta bina pustaka dan kearsipan;
3. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Struktur Organisasi DISARPUS Kota Bandung

Jabatan struktural/ fungsional pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, terdiri atas :

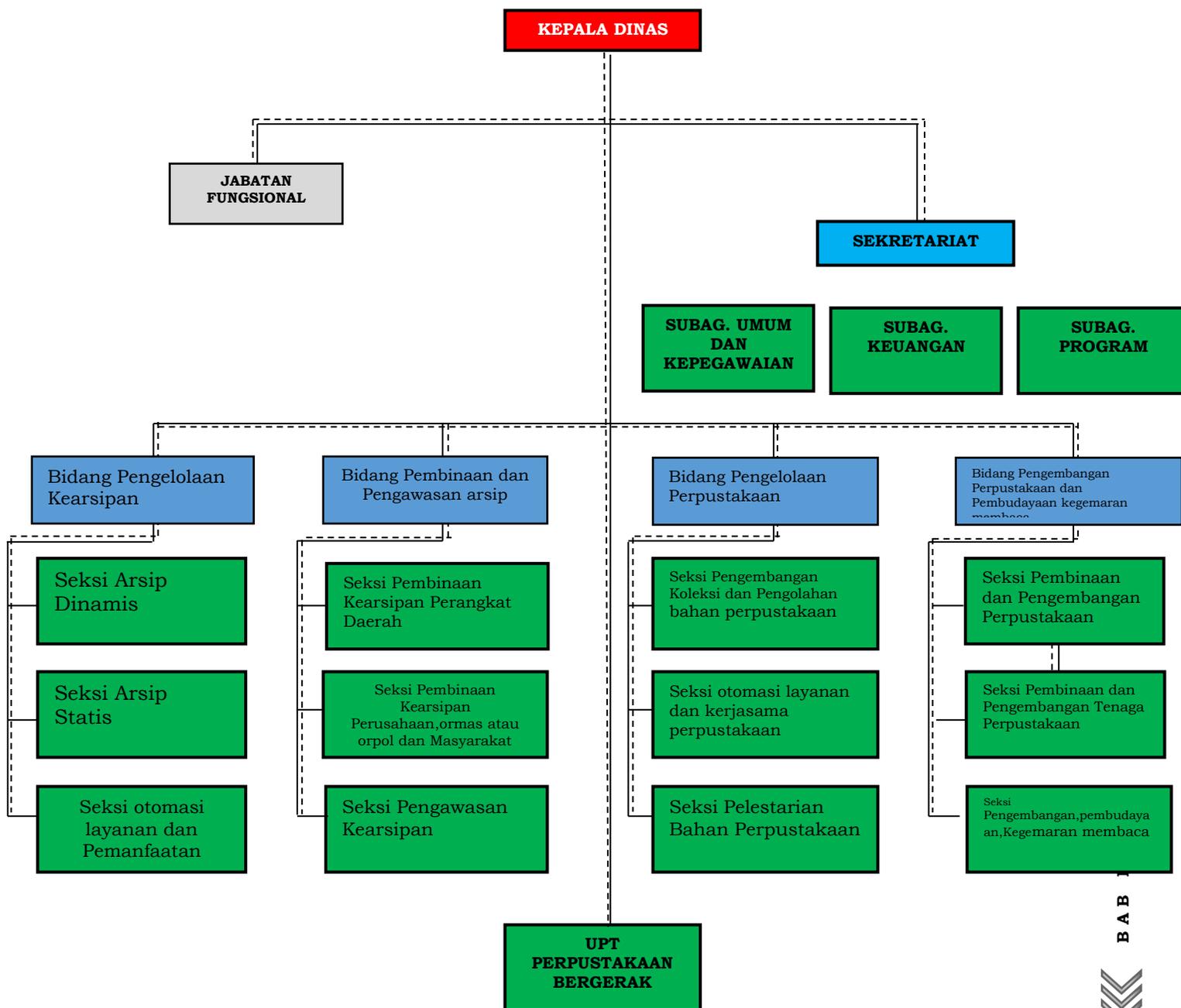
1. Kepala Dinas (eselon II.b)
2. Sekretaris Dinas (eselon III.a)
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (eselon IV.a)
4. Kepala Sub Bagian Keuangan (eselon IV.a)
5. Kepala Sub Bagian Program data dan Informasi (eselon IV.a)
6. Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan (eselon III.b)
7. Kepala Seksi Arsip Dinamis (eselon IV.a)
8. Kepala Seksi Arsip Statis(eselon IV.a)
9. Kepala Seksi otomasi layanan dan Pemanfaatan Arsip (Eselon IV.a)
10. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip (eselon III.b)
11. Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah (eselon IV.a)
12. Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan Perusahaan,ormas atau orpol dan Masyarakat (eselon IV.a)
13. Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan (eselon IV.a)



14. Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan (eselon III.a)
15. Kepala Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan bahan perpustakaan (eselon IV.a)
16. Kepala Seksi otomasi layanan dan kerjasama perpustakaan(IV.a)
17. Kepala Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan (IV.a)
18. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan kegemaran membaca(III.b)
19. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan (IV.a)
20. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan (IV.a)
21. Kepala seksi Pengembangan,pembudayaan,Kegemaran membaca (IV.a)
22. Jabatan Fungsional Arsiparis
23. Jabatan Fungsional Pustakawan
24. Staf/Pelaksana : 22 orang
25. Tenaga Pendukung Non PNS : 25 orang



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANDUNG
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2021
(Tanggal 01 Maret 2021)**



B A B
≡



2.1 Sumber Daya DISARPUS Kota Bandung

a. Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, hingga bulan Desember 2017 sebanyak 48 orang. Berikut data pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan:

1. PNSD

a) Menurut pangkat dan golongan

- Pembina Utama Muda IV/c = 1 orang
- Pembina Tk. I IV/b = 3 orang
- Pembina IV/a = 8 orang
- Penata Tk.I III/d = 10 orang
- Penata III/c = 10 orang
- Penata Muda Tk.1 III/b = 3 orang
- Penata Muda III/a = 13 orang
- Pengatur II/d = 5 orang
- Pengatur II/c = 2 orang
- Pengatur Muda TK.I II/b = 1 orang

b) Menurut tingkat pendidikan

- S2 Pasca Sarjana = 13
- S1 Sarjana = 27
- Sarjana Muda = 5
- SLTA = 9



b. Data Sarana

Kondisi sarana dan prasarana yang terdapat di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung meliputi:

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	JUMLAH
1.	Bangunan Gedung	1 Buah
	Alat Angkut:	
2.	- Mobil	10 Unit
	- Motor	11 Unit
3.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	625 buah
4.	Buku/Perpustakaan	118.487 Eksemplar
5.	Roll O'Pack Putar	54 buah
6.	Roll O'Pack Dorong	162 buah
7.	Rak Arsip Besi	264 buah
8.	Lemari Arsip dari Kayu	11 buah
9.	Display Monitor	3 unit
10.	Gerobak Baca	30 unit
11.	Work Station	2 unit

2.2 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung yang dilaksanakan meliputi 2 urusan yakni Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan, dengan bentuk pelayanan sebagai berikut:



a. Pelayanan Perpustakaan:

- Pelayanan pustaka dan jasa informasi
- Pelayanan penelusuran literatur secara manual maupun digital
- Pinjam Pakai Gerobak Baca
- Pelayanan Bercerita/Story Telling;
- Pelayanan Peminjaman Koleksi Bahan Pustaka;
- Pelayanan Keanggotaan Perpustakaan;
- Penyiangn Koleksi Bahan Pustaka;
- Pemrosesan/Pengolahan Koleksi Bahan Pustaka;
- Katalogisasi Koleksi Bahan Pustaka;
- Pemeliharaan dan Perawatan Koleksi Bahan Pustaka
- Memberikan Pembinaan Perpustakaan kepada petugas Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kelurahan, dan Perpustakaan Kecamatan.

c. Pelayanan Kearsipan, meliputi:

- Pelayanan Arsip Statis;
- *Memberikan Pelayanan cek register akta kelahiran dan arsip vital lainnya kepada masyarakat;*
- Melaksanakan pembinaan kearsipan kepada petugas arsip di lingkungan instansi swasta dan pemerintah;
- Melakukan kegiatan pendataan dan penataan kearsipan terhadap SKPD di lingkungan instansi swasta/pemerintah Kota Bandung.



Tabel 2.3.1
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kota Bandung**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prosentase pemustaka pertahun				0,30%	0,33%	1,09%	N/A	N/A	0,39%	0,41%	2,57%	N/A	N/A	130%	124%	236%	N/A	N/A
2	Jumlah Bahan Pustaka (Judul)				24.466	28.716	30.706	N/A	N/A	27.216	29.406	32.079	N/A	N/A	111%	102%	104%	N/A	N/A
3	Jumlah Bahan Pustaka (Eksemplar)				59.078	24.466	80.866	N/A	N/A	67.784	74.366	87.836	N/A	N/A	115%	304%	109%	N/A	N/A
4	Prosentase Perpustakaan Kelurahan yang Aktif				53,64%	56,95%	80,13%	N/A	N/A	57,62%	76,16%	82,78%	N/A	N/A	107%	134%	103%	N/A	N/A
5	Persentase SKPD yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku				45,57%	58,23%	72,15%	N/A	N/A	45,57%	58,23%	91,14%	N/A	N/A	100%	100%	126%	N/A	N/A
6	Retrieval Arsip				30	15	15	N/A	N/A	25	14	15	N/A	N/A	83%	93%	100%	N/A	N/A
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan				70,75	80,00	81,50	N/A	N/A	71,49	81,00	81,99	N/A	N/A	101%	101%	101%	N/A	N/A
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kearsipan				N/A	75,00	80,00	N/A	N/A	N/A	77,00	81,87	N/A	N/A	N/A	102,67%	102,34%	N/A	N/A
9	Jumlah Pemustaka Pertahun				N/A	N/A	N/A	90,000	92	N/A	N/A	N/A	91,287		N/A	N/A	N/A	101,43%	
10	Jumlah Perpustakaan Kelurahan yang Aktif				N/A	N/A	N/A	136	151	N/A	N/A	N/A	137		N/A	N/A	N/A	100,74%	
11	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku				N/A	N/A	N/A	58	73	N/A	N/A	N/A	58		N/A	N/A	N/A	100,00%	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung				N/A	N/A	N/A	82,00	82,00	N/A	N/A	N/A	82,80		N/A	N/A	N/A	100,98%	



Tabel 2.3.2
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kota Bandung**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Non Urusan																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.115.475.000	1.667.150.000	2.395.025.000	6.487.355.196	4.900.510.952	1.051.488.470	1.599.050.260	2.303.929.309	6.487.355.196		94,26%	95,92%	96,20%	100,00%			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.084.450.000	1.508.100.000	1.776.680.000	1.714.065.597	4.353.119.502	1.019.094.870	1.411.796.940	1.620.318.605	1.525.216.088		93,97%	93,61%	91,20%	88,98%			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	56.000.000	182.120.000	128.500.000	246.345.000	142.190.950	55.086.000	172.073.750	123.602.500	237.600.000		98,37%	94,48%	96,19%	96,45%			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	243.050.000	274.200.000	244.200.000	n.a	n.a	238.681.038	202.670.100	210.942.900	n.a	n.a	98,20%	73,91%	86,38%	n.a			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000	110.000.000	112.514.000	n.a	n.a	58.331.000	109.876.000	112.398.000	n.a	n.a	97,22%	99,89%	99,90%	n.a			
Urusan Wajib Perpustakaan																	
Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan	173.200.000	360.850.000	219.786.000	371.869.702	176.832.300	72.229.750	307.641.335	155.360.125	281.657.260		41,70%	85,25%	70,69%	75,74%			
Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan	20.900.000	32.600.000	60.000.000	11.084.921.510	172.419.900	20.823.080	32.533.475	57.284.450	68.933.400		99,63%	99,80%	95,47%	0,62%			
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca	1.091.070.000	2.018.365.707	1.959.380.707	4.867.920.311	2.650.231.863	1.038.223.720	1.612.411.915	1.808.412.240	1.667.632.075		95,16%	79,89%	92,30%	34,26%			
Urusan Wajib Kearsipan																	
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	106.650.000	730.950.000	523.100.000	820.807.900	248.787.600	55.997.500	392.901.583	276.303.456	679.200.585		52,51%	53,75%	52,82%	82,75%			
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	112.350.000	272.950.000	205.000.000	316.305.000	58.702.300	62.204.500	225.860.415	178.955.360	297.923.000		55,37%	82,75%	87,30%	94,19%			
Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	47.750.000	101.300.000	191.400.000	334.256.000	283.481.000	45.498.100	99.024.690	117.428.550	278.271.500		95,28%	97,75%	61,35%	83,25%			
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	85.000.000	84.700.000	109.700.000	73.656.000	63.147.600	83.618.250	79.199.500	98.167.900	64.690.750		98,37%	93,51%	89,49%	87,83%			



2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

a. Tantangan

Tantangan adalah hal-hal yang dapat menghambat kepada keberhasilan Program Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, antara lain:

1. Rendahnya minat baca masyarakat;
2. Rendahnya kesadaran Aparatur/SKPD dalam pengelolaan arsip;
3. Kurangnya Tenaga Pengelola perpustakaan dan kearsipan termasuk Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis;
4. Belum adanya tempat penyimpanan arsip (Depo Arsip) yang memadai;
5. Kurangnya Sarana dan Prasarana perpustakaan dan kearsipan;

b. Peluang

Beberapa peluang yang akan mendukung kepada kelancaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung dalam mencapai Visi dan Misinya adalah:

1. Adanya komitmen pimpinan dan komitmen staf;
2. Tersedianya Anggaran, Program dan Kegiatan;
3. Tersedianya Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK);
4. Tersedianya Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan dan Pengelola Kearsipan.
5. Tersedianya Micro Library/taman bacaan di tiap kecamatan



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

A. ISU INTERNAL

1) Rendahnya Sumber Daya Manusia Aparatur.

Salah satu modal utama pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, beriman, taqwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional, dan berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat wirausaha melalui suatu sistem pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang terencana untuk mampu memiliki kompetensi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengembangan SDM bidang Kearsipan dan Perpustakaan melalui pendidikan dan pelatihan maupun seminar, agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM serta peningkatan jumlah pejabat fungsional Pustakawan dan Arsiparis.

Sumber daya manusia yang kompeten adalah seseorang yang memiliki unsur-unsur pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), peran sosial (*social role*), citra diri (*self-image*), perilaku (*behave*), dan motivasi (*motive*) sesuai dengan jenis pekerjaannya dan jenjang jabatannya. Dari unsur-unsur kandungan kompetensi tersebut, pengetahuan (*knowledge*) merupakan langkah pertama yang harus diberikan kepada



semua pihak yang terlibat dalam peningkatan dan penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan.

2) Koordinasi Antar Instansi Belum Sinergis

Pengembangan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan dalam konteksnya merupakan bidang pengembangan yang sangat kompleks dan memiliki banyak keterkaitan dengan pihak lainnya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung. Pengelompokan *stakeholders* dapat dijabarkan sebagai berikut : pemerintah, swasta, dan masyarakat. Gambaran pelaku dalam pengembangan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap upaya dan langkah-langkah pengembangan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan akan memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak yang terkait.

Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antara pelaku Kearsipan dan Perpustakaan dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan koordinasi perpustakaan dan penyelenggaraan kearsipan perlu dilakukan melalui program-program pembangunan lebih terpadu dan terintegrasi. Seperti halnya program pembangunan perpustakaan taman (*library in the park*) dan layanan perpustakaan keliling (*moving library*) akan berhasil apabila didukung oleh instansi terkait.

Berkaitan dengan urusan Kearsipan, dimana setiap Perangkat Daerah dirasakan masih belum optimal dalam menerapkan kearsipan secara baku meskipun Dinas Arsip dan Perpustakaan telah melakukan Pembinaan.

3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan



Upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat pada saat ini dihadapkan pada suatu dilema, bahwa di satu sisi diharapkan mampu berperan sebagai lembaga dalam meningkatkan budaya baca masyarakat Kota Bandung. Namun di sisi lain sebagai pusat pelayanan baca masyarakat tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai baik untuk sarana baca maupun peralatan kantor di gedung baru.

4) Belum terselesaikannya Pembangunan Gedung Depo Arsip

Sebagai lembaga kearsipan yang memiliki tugas pokok dalam penyelamatan, pendataan dan penataan arsip SKDP di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, akan semakin efektif jika didukung oleh sarana dan prasarana kearsipan yang memadai salah satunya adalah Gedung Depo Arsip yang representatif dan sesuai standar kearsipan. Pada tahun 2009 telah dilakukan pembangunan Depo Arsip di Jalan Caringin No. 103. Akan tetapi, pembangunan tersebut belum bisa diselesaikan seutuhnya dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi.

Semakin tingginya kegiatan administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung akan semakin tinggi pula arsip yang dihasilkan. Untuk itu diharapkan pembangunan gedung depo arsip dapat dilanjutkan guna penyimpanan dan penyelamatan arsip-arsip yang memiliki nilai tinggi yang dihasilkan oleh SKPD.

5) Belum Termanfaatkannya Teknologi Informasi secara Maksimal





Perkembangan teknologi informasi Dinas Arsip dan Perpustakaan sudah mulai dilaksanakan dengan membuat database informasi Kearsipan dan Perpustakaan. Akan tetapi, database informasi tersebut belum berkerja secara maksimal dikarenakan belum didukungnya oleh perangkat jaringan informasi yang maksimal serta sumber daya manusia yang sangat terbatas baik jumlahnya maupun kompetensinya.

1. SOP untuk sebagian kegiatan pada Disarpus belum disusun serta SOP yang telah ada belum diterapkan secara optimal.
2. Perubahan cara berpikir dan cara bekerja akibat penggunaan teknologi informasi;
3. Teknologi informasi (aplikasi) belum terintegrasi secara optimal.

B. ISU EKSTERNAL

1) Rendahnya Budaya Baca Masyarakat

Rendahnya minat baca masyarakat disebabkan oleh fasilitas perpustakaan yang kurang memadai, koleksi buku yang kurang lengkap, rendahnya koordinasi dengan pihak luar dalam menentukan lokasi pelayanan perpustakaan keliling, keterbatasan jumlah perpustakaan keliling.

2) Sistem Teknologi Informasi Kearsipan dan Perpustakaan

Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan membutuhkan berbagai acuan, khususnya yang terkait dengan prospek dan kelayakannya. Penyusunan berbagai acuan tersebut perlu didukung dengan sistem teknologi informasi serta data-data yang valid dan akurat.





Keberadaan database Kearsipan dan Perpustakaan sangat tepat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi, sampai saat ini database tersebut masih dikelola oleh internal lembaga, belum bisa di akses oleh khalayak umum. Sehingga beberapa informasi yang dibutuhkan oleh instansi terkait ataupun masyarakat belum bisa ditemukan dengan mudah dan cepat. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan server serta fasilitas pendukung system informasi lainnya. Oleh karena itu, diharapkan di tahun mendatang anggaran dapat ditingkatkan guna teknologi informasi Kearsipan dan Perpustakaan dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat.

3) Rendahnya Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan Kearsipan

Rendahnya pemahaman tentang pengelolaan kearsipan mengakibatkan banyak arsip-arsip tercecer, hilang dan tidak terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, para pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dipandang perlu memahami tata kelola arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kaidah kearsipan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah dengan mengikuti pendidikan dan latihan serta kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung pada setiap tahunnya.

4) Rendahnya kesadaran aparaturnya dalam pengelolaan arsip

Salah satu kunci untuk tumbuh dan berkembangnya pengelolaan kearsipan adalah terciptanya tata kelola arsip yang handal baik di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah





Kota Bandung maupun di tingkat swasta. Untuk itu, Lembaga Kearsipan Kota Bandung dalam hal ini Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung selalu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung untuk mengadakan program pendidikan dan pelatihan pengelolaan arsip bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut dilakukan untuk menumbuhkembangkan kesadaran setiap aparatur akan pentingnya pengelolaan arsip

C. REKOMENDASI DAN CATATAN STRATEGIS

1. Mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Pemerintah Kota Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Mengusulkan kebutuhan SDM pengelola kearsipan maupun Arsiparis kepada Walikota Bandung melalui Badan Kepegawaian Daerah;
3. Mengusulkan kebutuhan SDM pengelola perpustakaan maupun pustakawan kepada Walikota Bandung melalui Badan Kepegawaian Daerah;
4. Mengusulkan/ menyelenggarakan/ mengirimkan Diklat/ Bimtek pengelola arsip/ Arsiparis serta Pengelola Perpustakaan/ Pustakawan, melaksanakan sosialisasi dan lomba lomba;
5. Mendekatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat melalui :
 - Pelayanan Mobil Unit Perpustakaan Keliling (*moving library*);
 - Pembangunan Perpustakaan Taman (*Library In The Park*);
 - Menambah koleksi bahan pustaka;





- Melakukan pembinaan kepada perpustakaan Kelurahan/Kecamatan dan taman-taman bacaan masyarakat;
 - Melaksanakan lomba-lomba peningkatan minat baca masyarakat.
6. Mengusulkan anggaran pengadaan peralatan kantor kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di *dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.*
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung



akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan *SDM* Kota Bandung yang *berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.*

- Nyaman : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.
- Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal,





dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:





1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

Pencapaian misi 1 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 1 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing adalah membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan dan sosial budaya yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai-nilai agama , yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia.

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 1 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini :

1. Meningkatnya Ketenteraman, Kerukunan dan Kenyamanan Hidup Masyarakat.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya ketenteraman, kerukunan dan kenyamanan hidup masyarakat Kota Bandung adalah Indeks Modal Sosial.

2. Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya pendidikan yang



berkualitas di Kota Bandung adalah Harapan Lama Sekolah.

3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Umur Harapan Hidup.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.

Pencapaian misi 2 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 2 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan melayani adalah terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dan level kematangan Smart City.

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 2 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini :

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi adalah Nilai Evaluasi Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota, Nilai LPPD Kota, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Level Kematangan Smart City Kota Bandung

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal

Pencapaian misi 3 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 3 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Bandung, PDRB Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita.

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 3 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini :

1. Meningkatnya Perekonomian Kota

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perekonomian kota adalah PDRB perkapita dan Indeks Pariwisata.

2. Meningkatnya Kesempatan Kerja





Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatkan kesempatan kerja adalah tingkat pengangguran terbuka.

3. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait menurunnya jumlah penduduk miskin adalah angka kemiskinan.

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

Pencapaian misi 4 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 4 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan adalah terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indikator kinerja Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur Kota Bandung.

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 4 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini :



1. Meningkatnya ruang kota yang aman, nyaman, tertib dan berkelanjutan
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya ruang kota yang aman, nyaman, tertib dan berkelanjutan adalah Persentase RTH
2. Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas adalah Persentase Luas Genangan yang tertangani, Titik kemacetan yang tertangani, dan Persentase luasan kawasan kumuh.
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung adalah Indeks kualitas lingkungan hidup dan Cakupan layanan pengelolaan sampah kota

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota melalui pembiayaan inovatif dan terintegrasi dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat. Pencapaian misi 5 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 5 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi adalah optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan, yang dapat dilihat atau diukur dari indikator kinerja tingkat persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap pendapatan.



B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 5 di atas, maka dapat dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini :

1. Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan adalah tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan

2. Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan adalah persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari CSR dan presentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang sebagian dibiayai dari swasta (KPBU, PINA, hibah, dll)

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan

Hasil *Review* terhadap Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. *Review* ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung dengan Renstra Disarpusda Jawa Barat.

Selain telaah terhadap renstra Disarpusda Provinsi Jawa Barat, informasi tentang dasar hukum dan kedudukan, ruang lingkup serta muatan isi dokumen perencanaan baik di level





nasional maupun daerah memberikan pemahaman tentang hubungan dokumen perencanaan nasional dan daerah.

Sebagaimana ketentuan yang telah diamanatkan dalam paket perundang-undangan yang baru yaitu:

- ☞ UU No. 17/2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ☞ UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- ☞ UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- ☞ UU No 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- ☞ PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Telah mewajibkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyiapkan beberapa dokumen penting perencanaan dalam rangka pengelolaan pembangunan, baik dalam skala nasional maupun skala daerah.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dispusipda Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembudayaan membaca masyarakat;
2. Mewujudkan tertib arsip;
3. Mengembangkan dan melestarikan bahan perpustakaan dan arsip sebagai sumber informasi dan pengetahuan;



4. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan;
5. Memenuhi Standarisasi Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Perpustakaan;
6. Mengoptimalkan pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Berdasarkan visi dan misi Disarpusda Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Disarpus sebagai Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan, ikut bertanggung jawab dalam pengembangan perpustakaan guna meningkatkan minat baca masyarakat Kota Bandung serta melaksanakan penyelenggaraan kearsipan baik di Disarpus Kota Bandung maupun di Seluruh Unit Kearsipan SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
2. Melakukan proses koordinasi agar penyelenggaraan urusan Kearsipan dan Perpustakaan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tetap berada dalam batas-batas kendali yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan kegiatan pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan, hal ini diperlukan agar pemahaman pengelolaan perpustakaan wilayah dan pengelolaan kearsipan SKPD akan berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

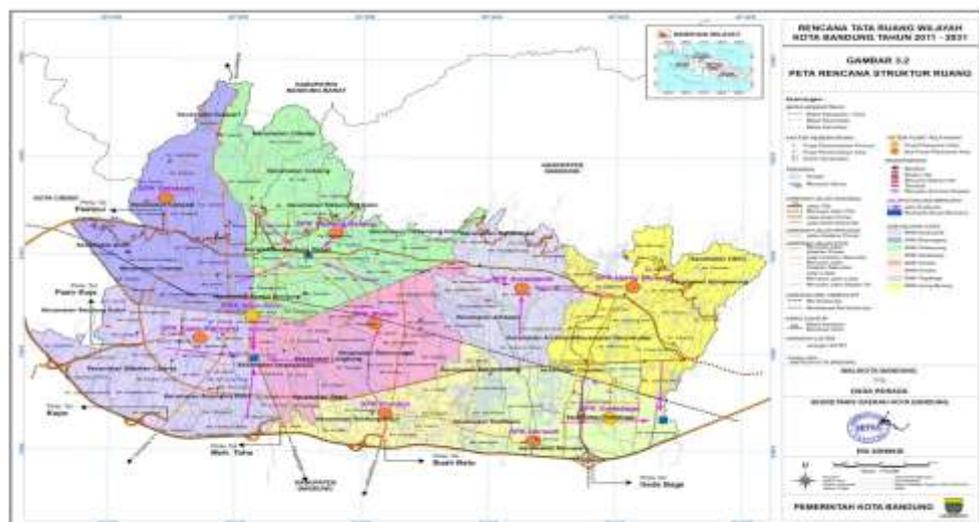
Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Gedung Perpustakaan pada saat ini berlokasi di jalan Seram no.2, lokasi tersebut terletak di “tengah” Kota Bandung sehingga dirasakan strategi untuk menjangkau dan melayani para pemustaka yang menginginkan pelayanan perpustakaan lebih mudah dijangkau.

Namun demikian, untuk menjangkau para pemustaka karena gedung yang kami tempati masih relative baru dan belum banyak diketahui oleh masyarakat, maka kami memaksimalkan perpustakaan keliling, mengikuti pameran-pameran, dan penyelenggaraan perlombaan untuk meningkatkan budaya baca masyarakat.

Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung





3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal;
2. Keanekaragaman Koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Pertumbuhan perpustakaan Kelurahan belum optimal.
4. Masih rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Belum optimalnya dalam retrieval arsip.
6. Layanan perpustakaan baru sebagian kecil saja menjangkau ke seluruh wilayah Kota Bandung.
7. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola Kearsipan dan Perpustakaan belum memadai.





BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANDUNG

Program dan Kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung adalah mendorong terhadap capaian kinerja 2 (dua) Misi Pembangunan pada RPJMD 2018-2023, yaitu :

- **Misi 1 yakni** : ***“Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing”***.
- **Misi 2 yakni** : ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani serta berdaya saing”***.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung selama lima tahun.

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat;
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Kearsipan;
3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat;



Adapun indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

1. Prosentase pemustaka per tahun
2. Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung 2018 - 2023 adalah:

1. Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat ;
2. Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Adapun Indikator Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut:

1. Indeks baca masyarakat
2. Nilai Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kota Bandung dengan kategori Baik
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan dan Kearsipan





**Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan
Perpustakaan Kota Bandung 2018-2023**

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2019	2020	2021	2022	2023	
Misi 1 : Mewujudkan Budaya Baca Masyarakat										
1.	Mewujudkan budaya baca Masyarakat	Prosentase Pemustaka per tahun	Meningkatnya budaya baca masyarakat	Indeks baca Masyarakat		74,76	75,03	76,04	77,02	
Misi 2 : Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan										
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Kearsipan	Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kota Bandung dengan Katagori Baik			65,20	67,80	70,80	

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KETERANGAN
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan budaya Baca Masyarakat	Prosentase Pemustaka per tahun	7%	Meningkatnya budaya Baca Masyarakat	Indeks baca Masyarakat		74,76	75,03	76,04	77,02	
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Kearsipan	Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah daerah	60 PD	Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kota Bandung dengan Katagori Baik			65,20	67,80	70,80	
3	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.00	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung	83.00	83.25	83.50	83.75	84.00	





BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Strategi dan Kebijakan SKPD

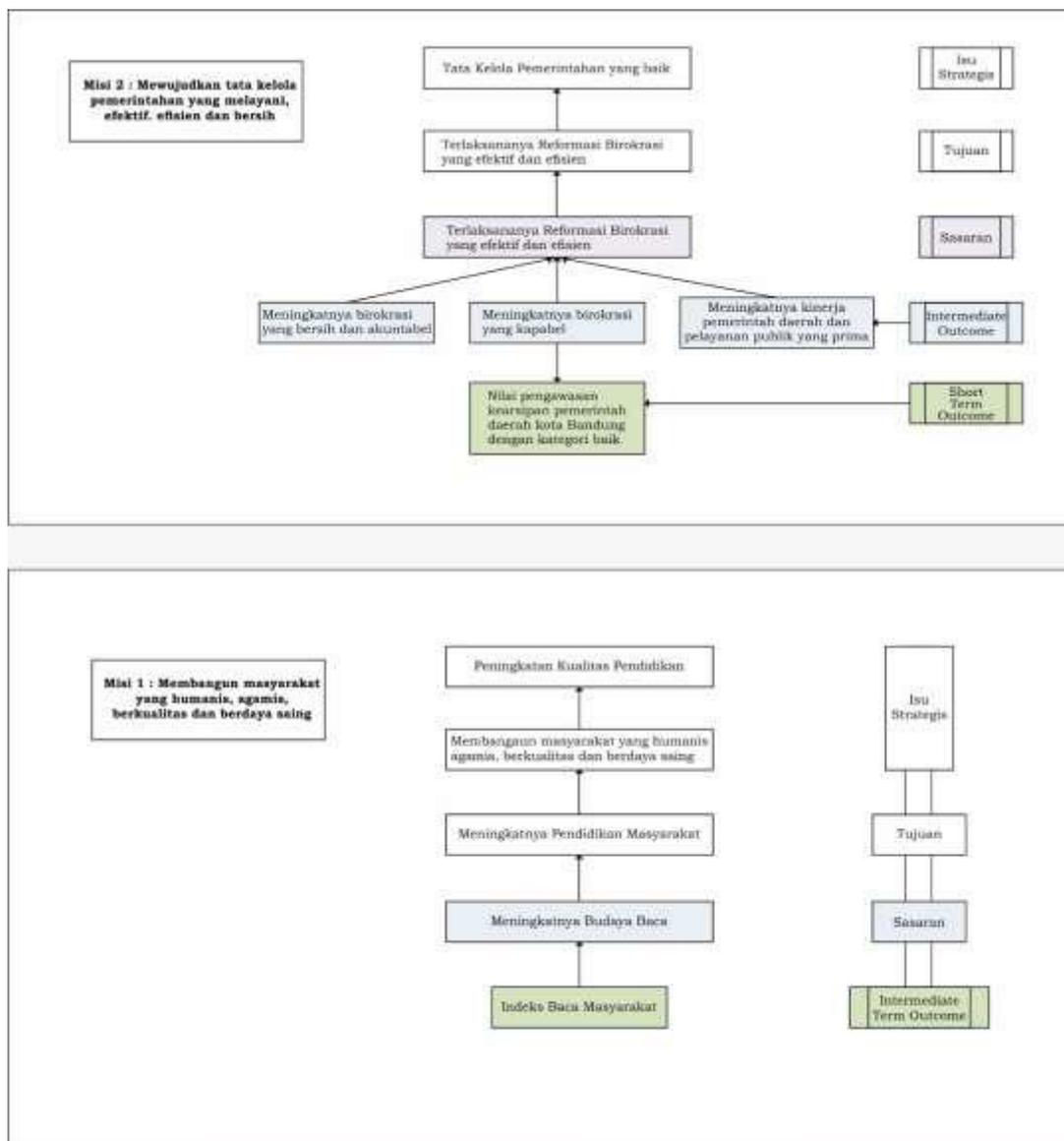
Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayanan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi jangka menengah Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2018-2023 yaitu analisis Logic Model. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan.

Logic Model ini membantu penyusunan desain perencanaan, pengembangan strategi, dan lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi. Serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Berikut Logic Model Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.

Logic Model Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung



Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung mempunyai dua buah urusan untuk tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Urusan yang diampu adalah urusan kearsipan dan perpustakaan.

Hasil yang ingin dicapai dalam urusan perpustakaan adalah indeks baca masyarakat ini dapat diukur melalui beberapa indikator kebijakan yaitu nilai rata-rata aspek pemanfaatan bahan bacaan dan sumber informasi, nilai rata-rata aspek ketersediaan fasilitas membaca dan sumber informasi serta nilai rata-rata aspek kebiasaan membaca masyarakat.



Dengan hasil seperti tersebut di atas, diharapkan akan meningkatkan budaya baca pada masyarakat Kota Bandung. Sehingga akan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Jika kualitas pendidikan masyarakat meningkat, akan membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.

Mengenai urusan kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, hasil yang akan dicapai adalah Nilai Pengawasan Kearsipan Pemerintah Daerah dengan Kategori Baik, yang diukur melalui beberapa indikator kebijakan yaitu nilai aspek pengawasan kearsipan lingkup pengelolaan kearsipan dan nilai aspek pengawasan lingkup pembinaan dan pengawasan Kearsipan.

Dari hasil tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan birokrasi yang kapabel dalam upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Jika kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi meningkat, maka akan terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih.

Berdasarkan hasil rewiu dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB), berikut merupakan Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung:

1. Meningkatkan layanan dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan, melalui strategi:
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. Mengembangkan pelayanan perpustakaan keliling selain jam kerja (moment *car free day* dan gelar baca di taman-taman Kota Bandung)
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan informasi perpustakaan dan budaya baca;
2. Meningkatkan penambahan koleksi bahan pustaka melalui strategi:
 - a. Melaksanakan pengadaan koleksi bahan pustaka.



3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan perpustakaan melalui strategi:
 - a. Melaksanakan pembinaan pengelolaan perpustakaan di Kota Bandung
4. Meningkatkan pembinaan/penyuluhan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan yang berlaku, melalui strategi:
 - a. Melaksanakan penyuluhan penyelenggaraan kearsipan SKPD
 - b. Memberikan penghargaan terhadap SKPD yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik
5. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, melalui strategi:
 - a. Melaksanakan sistem administrasi kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
 - b. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip daerah
 - c. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
6. Mewujudkan pelayanan prima, melalui strategi:
 - a. Memberikan pelayanan perpustakaan dan kearsipan secara prima
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan
7. Meningkatkan laporan keuangan tepat sasaran dan tepat waktu, melalui strategi:
 - a. Melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - c. Peningkatan disiplin aparatur
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - e. Melaksanakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.





Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis			
MISI 1 : Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Budaya Baca Masyarakat	Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	Meningkatnya budaya baca	1. Pemanfaatan bahan bacaan dan sumber informasi
			2.ketersediaan fasilitas membaca dan sumber informasi
			3 meningkatnya kebiasaan membaca masyarakat
MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih			
Meningkatkan Penyelenggaraan Kearsipan	Meningkatnya Pengelolaan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah	Nilai pengawasan kearsipan Pemerintah Kota Bandung dengan katagori baik	Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kota Bandung
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan pelayanan prima	1. Melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
			2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
			3. Peningkatan disiplin aparatur
			4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
			5. Melaksanakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan





BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja. Program-program pembangunan ini meliputi:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melalui :**
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya



- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. Program Pembinaan Perpustakaan, melalui :

- a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kota/Kabupaten
 - Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
 - Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kota/Kabupaten
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat
 - Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial



3. **Program Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, melalui:**
 - a. Kegiatan Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

4. **Program Pengelolaan Arsip, melalui:**
 - a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
 - Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
 - c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kota/Kabupaten

5. **Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, melalui :**
 - a. Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip



- Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
Sub Kegiatan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
- 6. Program Perijinan Penggunaan Arsip, melalui :**
- a. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kota/Kabupaten
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

Program Operasional

1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Program ini merupakan aplikasi dari kebijaksanaan yang telah digariskan dalam upaya melengkapi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perpustakaan dan pelaksanaannya dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan perabot dan perlengkapan perpustakaan;
- b. Meningkatkan mobilisasi yakni Mobil Unit Perpustakaan Keliling, Mobil Unit Perpustakaan Elektronik Keliling, Mobil Unit Kearsipan serta pengadaan motor operasional Pustakawan dan Arsiparis.

2. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini untuk meningkatkan layanan perpustakaan diantaranya :



- a. Meningkatkan layanan perpustakaan keliling (*Moving Library*), pelaksanaannya dengan melalui kegiatan layanan di daerah yang belum terjangkau, dan perpustakaan sekolah/masyarakat yang masih tertinggal;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan; Yakni dengan mengadakan koleksi perpustakaan, baik berupa buku maupun bahan bacaan lainnya seperti majalah, surat kabar, jurnal, kliping dan koleksi audio visual, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Peningkatan dan pengembangan koleksi ini selain untuk Perpustakaan Kota Bandung juga untuk Perpustakaan Kelurahan
- c. Melakukan Promosi perpustakaan; Promosi perpustakaan ini meliputi pameran, pembuatan brosur/pamphlet/liflet/stiker, lomba minat baca dengan melalui lomba puisi, lomba mengarang, lomba pidato, lomba bercerita (*Story telling*).
- d. Melakukan Automasi perpustakaan. Yakni dengan melakukan *entri data* atau pemasukan data buku dan data anggota, sehingga layanan dapat diberikan secara cepat dan tepat, terutama dalam penelusuran informasinya, baik yang ada di perpustakaan maupun yang ada di luar perpustakaan, secara *on line* baik dengan intranet maupun internet
- e. Pembinaan disini dapat meliputi beberapa kegiatan, diantaranya tentang koleksi bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, tenaga pengelola perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, pelayanan dan sebagainya.
- f. Mengadakan jambore baca;



Jambore baca ini dapat dilakukan dengan mengadakan lomba minat baca puisi, lomba pidato, lomba berceritera (*Story Telling*), membuat resensi buku, mengarang dan sebagainya yang diikuti oleh semua lapisan masyarakat, baik pelajar, mahasiswa, pegawai maupun masyarakat umum

g. Meningkatkan Pemasyarakatan Minat Baca dan Kebiasaan Membaca.

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar, membuat slogan, stiker, poster, mengadakan gerakan pencinta buku, penancangan gerakan kebiasaan membaca dan sebagainya

2. Program Pengelolaan Arsip

Program ini lebih diarahkan kepada kelangsungan penanganan arsip di unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung secara baik dan tertib dengan melalui kegiatan meningkatkan pembinaan dan pengembangan Tenaga Pengelola Kearsipan, pemeliharaan dan pengamanan arsip yang disimpan, baik dari segi fisiknya maupun dari segi kandungan isinya sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melalui kegiatan :

a. Melakukan Pemeliharaan dan Perawatan Arsip;

Kegiatan ini dilakukan dengan cara memelihara arsip-arsip baik dari segi fisik arsip maupun dari segi kandungan isinya serta perawatan dengan menggunakan kapur barus (kamper) dan Pengasapan (*Fogging*), dalam hal ini di Pemerintah Kota Bandung Pemeliharaan dan Perawatan Arsip masih



menggunakan system konvensional, yang mana nantinya akan mengarah ke pemeliharaan modern yaitu system Fumigasi

b. Melakukan Automasi Kearsipan;

Kegiatan ini dengan cara mengalihkan data / arsip secara elektronik, baik berupa tulisan, maupun gambar, dengan menggunakan *CD-ROM*, *SCANNER* dan alat lainnya, sehingga nilai kandungan arsip akan terjamin serta akan lebih memudahkan dalam penemuan kembali terhadap arsip yang dibutuhkan atau diperlukan

c. Melakukan Penyusutan Arsip;

Kegiatan Penyusutan Arsip ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan antara lain :

1. Pembentukan Tim Penilai dan Penyusutan Arsip yang melibatkan beberapa instansi yang terkait;
2. Survey dan Pendataan Arsip yang akan disusutkan;
3. Pemilahan arsip yang akan disusutkan sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang telah ditetapkan dan dicatat dalam Buku Pertelaan Arsip;
4. Pemusnahan arsip-arsip yang tidak bernilai guna dengan cara dibakar, dicerah dan atau dihancurkan dengan cairan kimia;
5. Membuat Berita Acara Penyusutan Arsip dan Berita Acara Pemusnahan Arsip.



5.2 Pendanaan

Dalam menetapkan program dan kegiatan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung, kami telah mempertimbangkan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang telah disepakati, yang tersaji dalam tabel sebagai berikut:



**Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung
Tahun 2018-2023**

Tabel 7.4.2
Rencana Kegiatan, Kegiatan dan Perubahan Peringkat Insansi Produk/Output dan Indikator
Kota Bandung

Tipe	Asesmen	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Kegiatan (Output) dan Indikator (Output)	Rata-rata Capaian pada Tahun-tahun sebelumnya	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan												Mendekatkan pada nilai persentase Mutu Pelayanan Masyarakat	Sifat Sasaran (Peningkatan, Pemertahanan, Penurunan)	Kategori	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6 Kategori 7 Kategori 8 Kategori 9 Kategori 10 Kategori 11 Kategori 12 Kategori 13 Kategori 14 Kategori 15 Kategori 16 Kategori 17 Kategori 18 Kategori 19 Kategori 20	Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6 Kategori 7 Kategori 8 Kategori 9 Kategori 10 Kategori 11 Kategori 12 Kategori 13 Kategori 14 Kategori 15 Kategori 16 Kategori 17 Kategori 18 Kategori 19 Kategori 20	0 0 0 0 0 0	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indikator Kinerja Utama: Jumlah Layanan Publik yang Tersedia dan Berkualitas. Sasaran: Meningkatkan Akses Masyarakat ke Layanan Publik. Kegiatan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Indikator: Jumlah Layanan Publik yang Tersedia dan Berkualitas.	Rata-rata Capaian pada Tahun-tahun sebelumnya: 100%	100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip				
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000						
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000			100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000			100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000			100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000			100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000			100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000			100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000			100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000			100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000			100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000			100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000			100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000			100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000			100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000			100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000			100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
						100%	4.736.400.000	100%	4.736.400.000	100%	5.014.400.000	100%	5.713.400.000	100%	6.000.000.000			100%	6.000.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 ini merupakan landasan atau acuan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada, karena rangkaian kegiatan dari mulai Tujuan, Strategi dan Sasarannya adalah sebagai komitmen dari seluruh pegawai di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat ditentukan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia, baik secara teknis maupun managerial, penempatan parsonil yang tepat sesuai kemampuan akademis maupun pengalaman, bakat, minat dan sikap pengabdian yang tinggi, sarana dan prasarana dan juga anggaran yang memadai serta faktor pendukung lainnya.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 ini merupakan hasil rumusan berdasarkan misi yang diurut secara prioritas dan diperlukan saat ini, dan apabila ada perubahan dan akselerasi yang timbul, dapat diubah dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi.

Bandung, 07 Desember 2021
Plt. KEPALA DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN

Drs. ASEP SAEFUL GUFRON, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196905 19199603 1 003



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung dengan Dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, maka dalam penyusunannya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Baca Masyarakat	0	N/A	74.76	75.03	76.04	77.02	70.10
2	Nilai Pengawasan Kearsipan	0	N/A	85.12	65.20	67.80	70.80	77.00
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.50	83.00	83.25	83.50	83.75	84.00	84.00



Tabel Panjang Ranhir Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung

MISI 1

No	Strategi	Indikator Strategi	Kondisi Awal	Target				Satuan	No	Kebijakan	Indikator Kebijakan	Kondisi Awal	Target				Satuan	No	Program	Indikator Program	Kondisi Awal	Target				Satuan	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2020					2021	2022	2023	2020	2021					2022	2023					
3	Meningkatnya Budaya Baca	Indeks Baca masyarakat	74,76	75,03	76,04	77,02	nilai	6	Pemanfaatan Bahan Bacaan dan sumber Informasi	nilai rata-rata aspek pemanfaatan bahan bacaan dan sumber informasi	71,54	71,73	72,02	72,30	nilai	4	Program Pembinaan Perpustakaan	Rata-rata nilai aspek pemanfaatan bahan bacaan dan sumber informasi	71,54	71,73	72,02	72,30	nilai	DISARPUS			
								7	ketersediaan fasilitas membaca dan sumber informasi	nilai rata-rata aspek ketersediaan fasilitas membaca dan sumber informasi	86,33	86,33	86,33	86,33	nilai			rata-rata nilai aspek ketersediaan fasilitas membaca dan sumber informasi	86,33	86,33	86,33	86,33	nilai				
								8	Meningkatnya Kebiasaan membaca masyarakat	nilai rata-rata aspek kebiasaan membaca masyarakat	66,41	67,02	69,78	72,42	nilai			nilai indeks baca masyarakat aspek kebiasaan membaca masyarakat	66,41	67,02	69,78	72,42	nilai				
															5	Program Pelestarian koleksi Nasional dan Naskah kuno	nilai sub aspek pemanfaatan koleksi	96,30	96,30	96,30	96,30	nilai					

MISI 2

2	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Nilai Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kota Bandung dengan kategori Baik	N/A	65,20	67,80	70,80	Nilai	6	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Kota Bandung	Nilai aspek pengawasan kearsipan lingkup pengelolaan kearsipan	N/A	27,60	28,50	29,40	Nilai	16	Program Pengelolaan Arsip	1. Nilai Pengawasan Kearsipan pada aspek kebijakan, pengelolaan arsip, sumber daya kearsipan	N/A	19,50	20,10	21,00	Nilai	DISARPUS
										Nilai aspek pengawasan kearsipan lingkup pembinaan dan pengawasan kearsipan	N/A	37,60	39,30	41,40	Nilai			2. nilai pengawasan kearsipan pada aspek Sosialisasi Kebijakan, pembinaan dan pengawasan Kearsipan	N/A	37,60	39,30	41,40	Nilai	
															18	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (STATIS)	Nilai pengawasan kearsipan pada aspek pengelolaan arsip	N/A	8,10	8,40	8,40	Nilai		
															19	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Layanan arsip sesuai prosedur	N/A	100	100	100	Persen		